## J U R N A L PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Volume 14 Nomor 2/2021

Naskah diterima: 3 Juli 2021

direvisi akhir: 25 Agustus 2021

disetujui: 26 Agustus 2021

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM KREDIT SEMESTER DI SMA NEGERI 1 LAWANG

THE IMPLEMENTATION OF SEMESTER CREDIT SISTEM POLICY IN STATE SENIOR HIGH SCHOOL (SMAN) 1 LAWANG

**Jumad** 

SMA Negeri 1 Singosari

jumad07@guru.sma.belajar.id

**DOI** : 10.24832/jpkp.v14i2.493

#### **ABSTRACT**

The purpose of this research is to describe the implementation of semester credit sistem at SMA Negeri 1 Lawang. This means the research aims to find out how the semester credit sistem is applied at SMA Negeri 1 Lawang, the obstacles, and the efforts made to overcome them. This is policy research that uses a qualitative approach. Data collection methods used in this study were interviews, observations, document and archive studies. The informants in this study were the principal, vice principal in curriculum, teachers, school committees, and students. The data were analyzed using descriptive analysis following the stages of data reduction, data presentation, making conclusions and verification. The results of this study indicate that the application of the semester credit sistem at SMA Negeri 1 Lawang is a new semester credit sistem and its application is in accordance with the Regulation of Ministry of Education and Culture (Permendikbud) Number 158 of 2014. The obstacles faced in implementing the semester credit sistem were the lack of teacher commitment and support from parents whose children belong to the fast-learning group. Efforts made to overcome the problems were to choose teachers who had strong commitment and to conduct dissemination to parents and employing a statement letter.

Key words: Implementation, Education Policy, Semester Credit Sistem

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi kebijakan penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang. Implementasi yang dimaksud yaitu mengetahui bagaimana penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang, kendala dan hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kajian dokumen dan arsip. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, komite sekolah dan siswa. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang adalah Sistem Kredit Semester baru dan penerapannya telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Kredit Semester adalah kurangnya komitmen guru dan dukungan orang tua peserta didik yang putra-putrinya tergolong dalam kelompok belajar cepat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul adalah memilih guru yang memiliki komitmen serta mengadakan sosialisasi kepada orang tua peserta didik dan membuat surat pernyataan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Sistem Kredit Semester

#### **PENDAHULUAN**

enerapan Sistem Kredit Semester di sekolah Menengah Atas (SMA) mulai dilakukan sejak tahun pelajaran 2016/2017. Sistem pembelajaran ini hadir sebagai pengganti program akselerasi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta didik dengan bakat, kemampuan, dan kecerdasan di atas rata-rata (Hawadi, 2004). Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Pemerintah Nomor 6398/D/KP/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 yang secara resmi menutup program khusus kelas akselerasi. Poin penting dari surat edaran tersebut adalah mengakomodasi kebutuhan peserta didik cerdas istimewa dengan menerapkan Sistem Kredit Semester pada kurikulum 2013 serta tidak ada lagi istilah kelas akselerasi. Penerapan Sistem Kredit Semester ini dipandang lebih memberikan keadilan bagi peserta didik dibanding program kelas akselerasi. Secara pemerintah melarang sekolah untuk menerima peserta didik baru untuk kelas khusus akselerasi pada tahun pelajaran 2015/2016.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut, sekolah yang sebelumnya membuka kelas khusus akselerasi mulai berbenah diri dan mempersiapkan dengan matang suatu sistem baru dalam pembelajaran yang dikenal dengan istilah Sistem Kredit Semester (Ikasari, 2013). Hal utama yang mendasari penerapan Sistem Kredit Semester adalah realita bahwa setiap individu peserta didik memiliki keberagaman potensi dan kemampuan berbeda yang mengakibatkan potensi belajar peserta didik pun tidak sama. Selain itu, minat setiap peserta didik terhadap mata pelajaran pun sangat beragam. Dengan demikian, kesuksesan belajar siswa dalam menempuh studi sangat bergantung pada kecepatan belajar peserta didik (Dantes, 2008).

Dalam konteks pembelajaran, penerapan Sistem Kredit Semester dengan melihat keragaman potensi masing-masing peserta didik sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan Pasal 19 ayat (1) yang menekankan adanya ruang yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian dalam proses pembelajarannya (Republik Indonesia, 2005). Bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologis peserta didik wajib diperhatikan dalam proses pengembangan kreativitas dan

kemandirian. Harapannya agar tercipta proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menarik dan menyenangkan, serta mampu memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran (Republik Indonesia, 2003). Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa beban belajar yang wajib ditempuh peserta didik bisa dinyatakan dalam bentuk Sistem Kredit Semester. Penerapan Sistem Kredit Semester di sekolah menengah atas semakin nyata dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (Kemdikbud, 2017).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era abad ke-21 ini menyebabkan terjadinya perubahan pada berbagai aspek kebutuhan peserta didik. Tersedianya sumber belajar yang sangat mudah diakses oleh peserta didik, kapan saja dan di mana saja serta sesuai dengan harapan dan keinginan peserta didik, menyebabkan pola-pola pembelajaran tradisional yang terikat dengan jadwal, monoton duduk di ruang kelas, menjadi kurang disukai peserta didik (Hamalik, 2001). Realita ini menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah menengah. Peserta didik dengan gaya belajar yang ditopang kecanggihan teknologi informasi perlu dipantau dalam proses belajarnya sehingga mencapai target yang diharapkan (Rosyada, 2020).

Realitas ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa peserta didik harus diberi ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dengan pola pembelajaran yang memberikan keleluasaan bagi peserta didik (Dantes, 2008). Pola pembelajaran yang mampu mengakomodasi serta mengoptimalkan potensi peserta didik adalah pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (Ikasari, 2013).

SMA Negeri 1 Lawang memiliki sejarah panjang dengan orientasi pembelajaran yang memiliki kemiripan dengan penerapan Sistem Kredit Semester yaitu sejak ditetapkan sebagai Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) tahun 1976 (Sukmadinata, 2012). Kemiripan ini terletak pada orientasi sekolah terhadap peserta didik. SMPP ini memiliki orientasi membimbing peserta didik untuk dapat mencapai perkembangan diri sendiri secara maksimal sesuai dengan kecerdasan, bakat, dan minat masing-masing. Orientasi ini selaras dengan penerapan Sistem Kredit Semester yang sejak tahun pelajaran 2017/2018 mulai diterapkan di SMA Negeri 1 Lawang. Pada tahun pelajaran 2019/2020 SMAN 1 Lawang telah meluluskan angkatan pertama Kurikulum 2013 dengan pola Sistem Kredit Semester.

Dalam wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 1 Lawang, Ibu Nusandari, beliau menjelaskan sejak pertama kali menerapkan Sistem Kredit Semester hingga saat ini belum pernah ada penelitian ilmiah ataupun evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ini. Lebih lanjut, Ibu Nusandari menjelaskan mengenai konsep pelaksanaan SKS baru yang telah diterapkan 2 tahun terakhir ini yaitu penggunaan unit kegiatan belajar mandiri (UKBM) sebagai bagian dari unit pembelajaran utuh. Namun, penerapan konsep tersebut sebagai diversifikasi kelompok belajar cepat, normal dan lambat terasa masih sulit diterapkan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana SMA Negeri 1 Lawang menerapkan SKS, apa saja faktor penghambat terlaksananya sistem SKS, serta upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nafia (2017) dengan judul Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus menguatkan pernyataan di atas. Menurut Nafia, proses pembelajaran SKS mampu mengakomodasi serta mengoptimalkan potensi peserta didik dalam mempercepat proses belajarnya. Langkah yang ditempuh dalam proses pembelajaran adalah dengan memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk kelas 4 semester dan 6 semester. Penerapan Sistem Kredit Semester di jenjang sekolah menengah atas mendapat respons positif dari peserta didik dengan 60,37 % siswa menyatakan setuju Sistem Kredit Semester ini diterapkan. (Qomariyah et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang" dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan SKS di SMA Negeri 1 Lawang? (2) Apa saja hambatanhambatan penerapan SKS di SMA Negeri 1 Lawang? (3) Apa upaya yang ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada?

#### **METODE**

#### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, data-data yang peneliti dapatkan akan disampaikan dalam perspektif emik, yakni dalam bentuk deskripsi dan cara pandang subjek penelitian (Hamidi, 2005). Metode yang digunakan adalah deskripsi analitik karena penelitian ini menekankan kedalaman makna sehingga data yang diperoleh diharapkan lebih akurat dan dapat digambarkan secara rinci agar mudah dianalisis oleh peneliti.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kebijakan karena mengkaji implementasi kebijakan penerapan SKS yang merupakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan yang dikaji adalah penerapan SKS di SMA Negeri 1 Lawang dengan fokus permasalahan pada pelaksanaan SKS, hambatan, serta upaya mengatasinya (Sugiyono, 2016).

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti mendata sekolah-sekolah vang telah menerapkan Sistem Kredit Semester di kabupaten Malang. Selanjutnya dipilih SMA Negeri 1 Lawang sebagai tempat penelitian, karena SMA Negeri 1 Lawang adalah salah satu sekolah yang telah menerapkan Sistem Kredit Semester dan belum pernah ada penelitian yang dilakukan terkait penerapan Sistem Kredit Semester tersebut. Selain itu, SMA Negeri 1 Lawang merupakan salah satu SMA unggulan di Kabupaten Malang dan memiliki sejarah yang mirip dengan penerapan Sistem Kredit Semester yaitu sekolah menengah persiapan pembangunan.

#### **Instrumen Penelitian**

Pada hakikatnya, dalam penelitian kualitatif, alat penelitian atau instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Namun, peneliti membutuhkan alat bantu guna mempermudah mencari informasi. Alat bantu yang digunakan bisa berupa lembar dokumentasi, lembar observasi, dan/atau lembar wawancara (Sugiyono, 2016).

#### Data dan Sumber Data

Data diperoleh dari proses pengumpulan data dengan sumber data sebagai berikut: (1) Siswa SMA Negeri 1 Lawang, (2) Wali Murid/Komite SMA Negeri 1 Lawang, (3) Guru SMA Negeri 1 Lawang, (4) Wakil kepala sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Lawang, dan (5) Kepala SMA Negeri 1 Lawang.

Data diambil dari berbagai aktivitas, pola pikir, sikap, perasaan-perasaan, tulisan, dan perilaku dari subjek yang diamati. Data tambahan juga diperoleh melalui dokumen tertulis dan foto.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara, observasi, kajian dokumen dan arsip merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Apabila dilihat dari segi sumber, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari guru melalui kegiatan wawancara, wali murid dan komite melalui wawancara dan kuesioner, wakil kepala sekolah bidang kurikulum melalui wawancara dan kuesioner, serta siswa melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepala sekolah.

Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini agar proses lebih fleksibel. Dalam penelitian pendidikan sangat tepat jika menggunakan wawancara semi terstruktur karena memungkinkan untuk melakukan pendalaman serta penyelidikan lebih jauh dan juga bisa memperluas respons orang yang diwawancara (Rumidi, 2002).

Pedoman wawancara yang digunakan yaitu:

- Lembar pertanyaan sebagai bahan wawancara dengan narasumber. Lembar pertanyaan ini dibuat sama untuk semua narasumber agar memudahkan dalam mengecek kebenaran dan validitas data sebagai bagian dari proses keabsahan data.
- Wawancara pertama kali dilakukan dengan kepala SMAN 1 Lawang untuk memastikan terlaksananya Sistem Kredit Semester, dilanjutkan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru pengajar, komite dan siswa SMAN 1 Lawang.
- 3. Dalam proses wawancara dilakukan dokumentasi dan hasilnya dicatat sebagai hasil wawancara.

4. Narasumber diminta untuk mengoreksi hasil wawancara, setelah terlebih dahulu dibuat reviunya oleh peneliti.

Sebagai penguat data penelitian serta pengalaman langsung tentang situasi sosial di lingkungan sekolah, perlu dilakukan observasi. Observasi dilakukan dengan menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, dan rekaman atau gambar kegiatan pembelajaran dan supervisi (Sukardi, 2004). Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang otentik dan memastikan hasil penelitian tentang penerapan SKS di SMA Negeri 1 Lawang, hambatan-hambatan penerapan SKS di SMA Negeri 1 Lawang, dan upaya yang ditempuh SMA Negeri 1 Lawang untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Penelusuran data sekunder dilakukan dengan mengkaji dokumen KTSP, dokumen pedoman penyelenggaraan SKS, UKBM dan foto kegiatan pembelajaran.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menjabarkan setiap berdasarkan teori yang digunakan. Langkahlangkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu reduksi, penyajian data dan verifikasi (Miles, 1992). Reduksi dilakukan dengan cara memilih dan memilah hasil wawancara yang sesuai dengan batasan masalah penelitian. Hal ini agar peneliti bisa lebih fokus pada persoalan yang dibahas. Menyajikan data secara runtut merupakan langkah kedua dalam proses analisis data. Langkah terakhir adalah verifikasi untuk memastikan validitas data yang sudah didapat melalui penelitian (Sutopo, 2002). Hal ini dilakukan setelah data dianalisis dan sudah memperoleh kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nantinya akan dicocokkan kembali ke lapangan untuk mengetahui validitasnya (Bungin, 2008).

### Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi dan reviu informan agar diperoleh penelitian yang valid dan reliabel (Widodo, 2010). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2017). Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Syaodih, 2011).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* dengan fakta dari sumber lainnya dengan menggunakan informan yang berbeda (Arifin, 1996).

Untuk mendapatkan persetujuan dan kesamaan pemahaman terkait laporan hasil penelitian, peneliti perlu mengkomunikasikan kepada informan kunci. Apabila informan kunci sudah menyetujui sepenuhnya ataupun setuju dengan revisi (revisi dahulu), hasil penelitian baru bisa dipublikasikan. Kegiatan reviu informan ini juga dikenal dengan istilah members check.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

## Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang

SMA Negeri 1 Lawang telah menerapkan Sistem Kredit Semester sejak tahun pelajaran 2017/2018. Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang diterapkan untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dalam hal ini, peserta didik haruslah dipandang sebagai pribadi unik dengan potensi yang berbeda (heterogen), dan sudah seharusnya mereka mendapat perlakuan yang berbeda dalam konteks belajarnya. Sistem Kredit Semester adalah sistem pembelajaran yang bisa mengakomodasi perbedaan tersebut.

Sistem Kredit Semester yang diterapkan di SMAN 1 Lawang menggunakan SKS baru, di mana peserta didik tidak dikelompokkan dengan pola-pola tertentu, tetapi difasilitasi dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri/UKBM (sebelum tahun 2019). Pola-pola tertentu yang dimaksud adalah pola 4 (empat) semester, pola 5 (lima) semester, dan pola 6 (enam) semester. Setelah tahun 2019, media diversifikasi peserta didik kelompok belajar cepat, lambat, normal, tidak

harus berupa UKBM, tetapi bisa berupa modul atau sumber lain sesuai dengan kompetensi Dasar (KD). Penerapan Sistem Kredit Semester menuntut peserta didik untuk proaktif, sedangkan guru lebih bersifat sebagai fasilitator.

Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA berbeda dengan akselerasi. Perbedaannya terletak pada penempatan peserta didik. Pada kelas akselerasi, peserta didik ditempatkan dalam satu kelas, administrasi peserta didik dalam satu kelas yang sama. Sedangkan pada Sistem Kredit Semester, peserta didik kelompok belajar cepat berada pada kelas yang berbeda-beda, dan administrasi peserta didik kelompok belajar cepat juga berada pada kelas yang berbeda. Jumlah peserta didik kelompok belajar cepat di SMAN 1 Lawang pada tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 21 siswa, dan pada tahun pelajaran 2020/2021 sebanyak 12 siswa.

Berdasarkan data di SMA Negeri 1 Lawang, penerapan SKS baru memang sangat berbeda dengan sistem akselerasi maupun SKS lama. Perbedaan akselerasi, SKS lama, dan SKS baru dapat dilihat secara lebih rinci melalui tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Akselerasi, SKS Lama dan SKS Baru

No.	Akselerasi	SKS Lama	SKS Baru
1.	Pelaksanaan akselerasi didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010. Berdasarkan SE Direktur PSMA sudah dilarang sejak 2015/2016	SKS Lama didasarkan pada Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 158 tahun 2014 serta panduan SKS yang dikeluarkan Direktorat PSMA (Lama)	SKS Baru didasarkan pada Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 158 tahun 2014 (Revisi) serta panduan SKS yang dikeluarkan Direktorat PSMA (Revisi 2017)
2.	Pelaksanaan Berbasis Kelas	Berbasis Sekolah	Berbasis Sekolah

No.	Akselerasi	SKS Lama	SKS Baru
3.	Ada pemampatan materi	Materi disusun Seri 1,2,3,dan 4 Pelaksanaan <i>On-Off,</i> kontinu dis kontinu	Tidak ada pemampatan materi. Materi dibuat dalam bentuk UKBM/ Modul
4.	Ada keharusan dalam hal waktu belajar, harus selesai 2 tahun	Waktu belajar terpola menjadi 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun	Waktu belajar bisa 2, 3, atau 4 tahun.
5.	Pembe- lajaran harus tuntas	Ada remedial dengan semester pendek saat libur sekolah di setiap semester	Remedial dilakukan pada saat pembelajaran tidak ada semester pendek
6.	Hanya ada satu kelas program 2 tahun	Siswa dikelompok- kan di awal semester menjadi program 4, 6, 8, semester	Tidak ada pemetaan kelas program 4, 6, 8, semester. Semua berjalan sesuai progres belajar siswa baik masuk pada kelas heterogen atau homogen
7.	Tidak mengenal istilah beban belajar	Beban belajar dinyatakan dengan satuan SKS	Beban Belajar dinyatakan dengan satuan JP (Jam Pelajaran)
8.	Saat ini dilarang untuk diterapkan	Disem- purnakan dengan SKS baru	Diterapkan sejak 2017/2018

Sumber: hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 1 Lawang.

Tahapan penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan persiapan dimulai dari kelas X semester 1. Pada tahap ini, dilakukan observasi terhadap peminatan IPA/IPS, dan dilihat apakah ada peserta didik yang benar-benar terkategori kelompok belajar cepat berdasarkan capaian pada semester 1. Selain itu, rekomendasi dari guru pengajar juga menjadi pertimbangan.

Secara teknis pelaksanaan SKS bagi peserta didik kelas X baru dilaksanakan di semester 2. Pada tahap ini, siswa katagori kelompok belajar cepat, mendapatkan treatment (perlakuan), di antara treatment yang dilakukan sekolah adalah mengundang orang tua peserta didik kelompok belajar cepat, memfasilitasi peserta didik dengan UKBM/modul, membentuk kelas khusus pada hari tertentu di luar jam KBM (materi tambahan), dan dipilihkan guru-guru yang memiliki komitmen tinggi. Hasil treatment terhadap peserta didik kelompok belajar cepat selanjutnya dievaluasi, apakah pemberian treatment bisa diikuti oleh peserta didik atau tidak bisa diikuti. Jika peserta didik tidak bisa mengikuti, peserta didik dikembalikan ke kelas reguler.

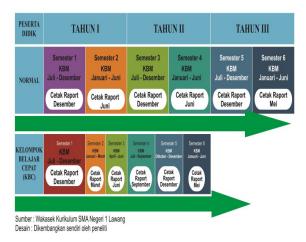


Gambar 2. Alur penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 1 Lawang

Sumber: Wakil kepala sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Lawang - Desain : Dikembangkan sendiri oleh peneliti

Pembelajaran dengan menggunakan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang memberikan batasan masa studi peserta didik yaitu paling cepat 2 tahun dan paling lama 4 tahun. Sistem Kredit Semester yang diterapkan di SMA Negeri 1 Lawang membuat peserta didik termotivasi untuk belajar karena target

pembelajaran lebih terarah dan jelas. Prinsipnya, tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah siswa yang kurang dalam pelayanan dan kurang fasilitas. Peta jalan peserta didik kelompok belajar cepat dan peserta didik normal pada sistem SKS digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Perbandingan peta jalan siswa Kelompok belajar Cepat (KBC) dengan siswa normal

Pengelolaan kelas menggunakan konsep pengelolaan kelas kombinasi antara konsep pengelolaan kelas homogen dan konsep pengelolaan kelas heterogen. Pengelolaan kelas homogen secara praktik di lapangan dirasa lebih mudah dibanding pengelolaan kelas heterogen. Pengelolaan kelas pembelajaran terjadi secara klasikal mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Pendahuluan sampai dengan penutup menggunakan media pembelajaran, model, maupun sumber belajar yang relevan. Sebagai contoh, jika dalam kelas X IPA A, X IPA B, X IPA C, X IPA D, dan X IPA E berturut turut terdapat 5, 4, 2, 4, dan 6 peserta didik kategori kelompok belajar cepat, peserta didik dari beberapa kelas tersebut dikumpulkan dan dilayani secara klasikal oleh seorang guru. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber : Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Lawang, Desain : Dikembangkan sendiri oleh peneliti

Gambar 4. Strategi Pengelolaan Kelas Homogen Pada Sistem Kredit Semester di SMAN 1 Lawang

Sedangkan pengelolaan kelas heterogen dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Dalam hal ini, peserta didik dikelompokkan sesuai dengan kecepatan belajarnya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 4.



Sumber: Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Lawang, Desain: Dikembangkan sendiri oleh peneliti

Gambar 5. Strategi Pengelolaan Kelas Heterogen Pada Sistem Kredit Semester di SMAN 1 Lawang

## Hambatan dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang

Faktor pendorong pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang adalah (1) input peserta didik yang cukup baik jika dilihat dari rata-rata hasil Ujian Nasional; (2) sarana dan prasarana yang memadai; dan (3) dukungan komite sekolah yang sangat tinggi. Di samping itu, SMA Negeri 1 Lawang memiliki sejarah penerapan sistem pembelajaran yang mirip dengan Sistem Kredit Semester, yaitu menggunakan sistem modul saat awal SMA berdiri. Secara psikologis, hal ini memberikan daya dorong dan kekuatan untuk menerapkan Sistem Kredit Semester.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 1 Lawang, Ibu Nusandari diperoleh data tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Sistem Kredit Semester. Faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran dengan SKS di SMAN 1 Lawang adalah (1) kurangnya komitmen guru pengajar dalam memfasilitasi siswa kelompok belajar cepat dan (2) kurangnya dukungan dari orang tua terhadap pendidikan bagi putraputrinya yang masuk dalam katagori kelompok belajar cepat.

Kurangnya komitmen guru dalam memberikan layanan kepada peserta didik kelompok belajar cepat, menurut ibu Nusandari terlihat ketika siswa dari kelompok belajar cepat meminta layanan pembelajaran tingkat lanjut, namun guru belum siap. Sedangkan kurangnya dukungan dari orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya yang masuk dalam kategori kelompok belajar cepat didasarkan pada informasi yang diberikan siswa terhadap respons orang tua yang kurang mendukung terhadap proses belajar peserta didik.

# Upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Lawang untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul

Berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang harus segera dicarikan solusi agar penerapan SKS bisa berjalan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis penerapan Sistem Kredit Semester. Dalam hal ini harus disesuaikan dengan Permendikbud nomor 158 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di sekolah menengah dan buku pedoman penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di SMA yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berbagai upaya yang dilakukan harus berangkat dari masalah yang menjadi penghambat dalam penerapan Sistem Kredit Semester.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakasek kurikulum, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang adalah memilih guru yang memiliki komitmen tinggi serta mengadakan sosialisasi bagi orang tua peserta didik. Guru yang memiliki komitmen tinggi adalah guru yang bersedia memberikan layanan pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik dengan heterogenitas tinggi baik dari bakat, minat dan kecepatan belajarnya. Di samping itu, sekolah juga mengundang orang tua peserta didik kelompok belajar cepat untuk memberikan informasi dan sosialisasi program Sistem Kredit Semester serta dibuatkan surat pernyataan untuk mendukung putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester.

#### **Pembahasan**

## Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang

Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang menggunakan SKS baru yang berbeda dengan SKS lama maupun akselerasi. Dalam Sistem Kredit Semester baru tidak dikenal istilah SKS kontinu dan SKS diskontinu. Dengan kata lain, tidak ada SKS 4, 5, dan 6 semester. Pembelajaran berlangsung secara alami sesuai dengan kecepatan peserta didik. Tidak ada pengelompokan siswa di awal semester juga merupakan ciri SKS baru yang diterapkan di SMA Negeri 1 Lawang.

Berdasarkan panduan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Sistem Kredit Semester bukanlah pengganti akselerasi, bukan pula kelas enrichment serta tidak mengenal istilah continue maupun discontinue (Tim SKS Direktorat PSMA, 2019). Sistem Kredit Semester hadir sebagai bentuk layanan pembelajaran yang memandang peserta didik sebagai individu unik atas kecepatan dan gaya belajarnya, dan sudah seharusnya untuk bisa dilayani dalam suatu bentuk pembelajaran yang berbeda satu sama lain.

Prinsip pengelolaan Sistem Kredit Semester adalah fleksibel, unggul, maju berkelanjutan, berkeadilan dan relevan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Fleksibel dalam pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar serta unggul dalam pengertian memungkinkan peserta didik untuk mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat dan kecepatan belajarnya. Maju berkelanjutan memungkinkan peserta didik untuk terus mengikuti pembelajaran tanpa terkendala oleh peserta didik lain. Berkeadilan berarti memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan sesuai dengan bakat, minat dan kecepatan belajarnya, sedangkan relevansi merupakan penyelenggaraan SKS yang disesuaikan dengan karakteristik jenjang, jenis dan satuan pendidikan (Kemdikbud, 2017).

Pedoman yang digunakan dalam menerapkan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang adalah Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaannya mengacu pada tujuh prinsip pelaksanaan Sistem Kredit Semester dan implementasinya pun sesuai.

## Hambatan dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang

Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang dapat ditinjau dari pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan. Pendekatan empiris digunakan dalam penelitian karena penelitian ini akan menjelaskan faktor dan masalah yang menyebabkan terhambatnya pembelajaran dengan SKS di SMAN 1 Lawang (Dunn, 2003). Berdasarkan pendekatan empiris ini ditemukan fakta bahwa faktor dan masalah yang menyebabkan terhambatnya penerapan kredit semester di SMA Negeri 1 Lawang adalah kurangnya komitmen guru dalam memfasilitasi kelompok belajar cepat dan kurangnya dukungan orang tua dalam mendukung putraputrinya yang masuk dalam kategori kelompok belajar cepat.

Kurangnya komitmen guru dalam memberikan layanan terhadap peserta didik disebabkan karena tidak adanya kemauan memberikan layanan prima pada peserta didik kategori kelompok belajar cepat. Dalam kajian implementasi kebijakan, hal ini dikenal dengan istilah disposisi. Artinya bahwa jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias (Widodo, 2010). Disposisi adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan. Disposisi itu mencakup komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik yang baik, dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan serta keinginan pembuat kebijakan.

Dari aspek disposisi ini, berdasarkan hasil wawancara dengan wakasek kurikulum SMA Negeri 1 Lawang, Ibu Nusandari, diperoleh kenyataan bahwa kurangnya komitmen guru dalam memberikan layanan kepada peserta didik kelompok belajar cepat menjadi salah satu kendala terlaksananya Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang. Kurangnya komitmen guru dalam melayani kelompok belajar cepat di

SMA Negeri 1 Lawang perlu mendapat perhatian dan penanganan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap pelaksanaan kebijakan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang.

Kurangnya dukungan orang tua untuk putra-putrinya yang masuk dalam kategori kelompok belajar cepat disebabkan karena kurang pahamnya orang tua terhadap Sistem Kredit Semester. Hal ini menjadi salah satu kendala karena berdampak terhadap peserta didik. Ketidakpahaman ini mungkin terjadi karena komunikasi yang kurang efektif terkait penerapan Sistem Kredit Semester khususnya bagi orang tua peserta didik (Widodo, 2011).

Faktor komunikasi ini menjadi sangat penting dalam konteks implementasi suatu kebijakan (Widodo, 2011). Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsisten, ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: (a) Transmisi. Dalam penyaluran komunikasi tidak jarang terjadi kesalahpahaman (miskomunikasi) disebabkan komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi. Akibatnya, terjadi distorsi yang membuat implementasi suatu kebijakan gagal. (b) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, tetapi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak ditetapkan. (c) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas (Abdul Wahab, 2012). Jika perintah yang diberikan sering berubahubah, dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Ditinjau dari aspek komunikasi dalam analisis kebijakan sebagaimana penjelasan di atas, informasi tentang Sistem Kredit Semester dan penerapannya sesuai dengan Permendikbud nomor 158 tahun 2014 bersumber dari Direktorat Pembinaan SMA dan dinas pendidikan provinsi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan workshop. Hasil berbagai kegiatan terkait dengan Sistem Kredit Semester yang diperoleh wakasek bidang kurikulum selanjutnya disampaikan kepada bapak/ibu

guru melalui kegiatan sosialisasi, workshop, maupun in-house training. Hal ini dilakukan agar semua stakeholder di SMA Negeri 1 Lawang bisa memahami prinsip penyelenggaraan Sistem Kredit Semester serta pengimplementasiannya di sekolah.

# Upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Lawang untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul

Model kebijakan menggunakan model retrospeksi yang menekankan pada perumusan masalah serta pengembangan alternatif untuk menyelesaikan masalah (Agustino, 2016). Hasil wawancara dengan wakasek kurikulum menunjukkan bahwa masalah yang muncul dalam pelaksanaan SKS di SMAN 1 Lawang adalah kurangnya komitmen guru dalam memberikan layanan kelompok belajar cepat dan kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya yang termasuk dalam kelompok belajar cepat. Kurangnya komitmen guru dan dukungan orang tua ini tentu akan berdampak pada layanan pendidikan terutama bagi kelompok belajar cepat yang membutuhkan layanan prima.

Kurangnya komitmen ini mengindikasikan ada semacam ketidakpatuhan guru dalam melaksanakan Sistem Kredit Semester yang berpedoman pada Permendikbud nomor 158 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di Sekolah Dasar dan Menengah. Sebagai solusi atas kendala ini, dipilihlah guruguru yang memiliki komitmen tinggi untuk menjadi pengajar bagi peserta didik kelompok belajar cepat.

Di sisi lain, diperoleh fakta bahwa dukungan orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya yang termasuk dalam kelompok belajar cepat masih sangat kurang. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman orang tua peserta didik terhadap pola pendidikan Sistem Kredit Semester. Sebagai alternatif penyelesaian dalam konteks ini adalah memberikan sosialisasi kepada orang tua peserta didik yang terkategori kelompok belajar cepat serta meminta dukungan orang tua peserta didik yang ditandai dengan surat pernyataan.

#### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian kebijakan penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang, peneliti mengambil kesimpulan penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) baru yang berbeda dengan Sistem Kredit Semester (SKS) lama maupun akselerasi. Kurangnya komitmen guru dan kurangnya dukungan orang tua terhadap putra-putrinya yang terkategori kelompok belajar cepat (KBC) menjadi faktor penghambat dalam penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang adalah memilih guru yang memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan pada peserta didik kelompok belajar cepat dan memberikan sosialisasi kepada orang tua peserta didik kelompok belajar cepat serta dibuatkan surat pernyataan dukungan orang tua/wali murid.

#### Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, untuk lebih meningkatkan layanan dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Lawang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Pada awal tahun pelajaran baru hendaknya ada penandatanganan pakta integritas bagi guru dalam memberikan layanan kepada peserta didik; (2) Hendaknya dilakukan sosialisasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Kredit Semester di awal tahun pelajaran baik terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali murid serta peserta didik.

#### **PUSTAKA ACUAN**

Abdul Wahab, S. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.

Arifin, I. (1996). *Penelitian Kualitatif*. Malang: Kalimasada Press.

- BNSP. (2010). *Panduan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Bungin, B. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dantes, N. (2008). Sistem Kredit Semester (SKS) dan Pembimbing Akademik (PA) dalam Kaitan dengan Implementasi Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (SKM) dalam *In House Training* (IHT) Rintisan SKM-SMA Dwijendra Denpasar.
- Direktorat Pembinaan SMA. (2008). Rancangan Penilaian Hasil Belajar. *Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas*.
- Direktorat Pembinaan SMA. (2018). Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 SMA Tahun 2018. Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 SMA Tahun 2018.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Hamalik, O. (2001). *Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA*. Bandung: Sinar Baru.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hawadi, R. Ak. (2004). Akselerasi (A-Z Informasi Program Percepatan Belajar Anak Berbakat Intelektual. Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indo.
- Ikasari, E. N. (2013). Pengaruh Kesiapan Sekolah terhadap Pelaksanaan Program Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun. http://jurnal.fkip.unila.ac.id, (2).
- Kemdikbud. (2017). *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA (pp.*1–36). Direktorat Pembinaan Sekolah
  Menengah Atas Dirjen Dikdasmen
  Kemdikbud.
- Miles, B. M. dan M. H. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metodemetode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Nafia, M. I. (2017). Penerapan Sistem Kredit Semester Di SMA Negeri 1 Kudus.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2016a). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2016b). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Qomariyah, S., Haris, I. A., & Suwena, K. R. (2019). Persepsi Siswa Kelas X terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri Bali Mandara Tahun Pelajaran 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. https://doi.org/10.23887/jjpe. v11i1.20163
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. In *Sekretariat Negara*. https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Rosyada, D. (2020). *Menjadi Guru Abad 21*. Diambil dari http://www.uinjkt.ac.id/id/menjadi-guru-di-abad-21/
- Rumidi, S. (2002). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*.
  Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas
  Press.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta*. https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666
- Sukardi. (2004). *Metodelogi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*.

  Jakarta: Sinar Grafika.

- Sukmadinata, N. S. (2012). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutopo, H. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Syaodih, N. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. VII.
- Tim SKS Direktorat PSMA. (2019). Implementasi SKS Di SMA. Bogor: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Dikdasmen Kemdikbud.
- Widodo. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media